

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

(Survey di KPP Pratama Se Eks Karesidenan Surakarta)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun oleh:

Hariyadi Lukman Widiarso

B 200 060 246

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**"PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN" (Survey di
KPP Pratama Se Eks Karesidenan Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

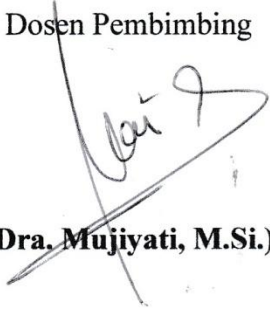
oleh :

HARIYADI LUKMAN WIDIARSO

B 200 060 246

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Dra. Mujiyati, M.Si.)

HALAMAN PENGESAHAN

**"PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN" (Survey di
KPP Pratama Se Eks Karesidenan Surakarta)**

oleh :

HARIYADI LUKMAN WIDIARSO

B 200 060 246

**Telah di pertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 6 Januari 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. **Dra. Mujiyati, M.Si.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr.Fatchan Achyani,S.E, M.Si.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Andi Dwi Bayu B., S.E,M.Si, Ph.D.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Syamsudin, M.M.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak kebenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 1 Februari 2018

Penulis



HARIYADI LUKMAN WIDIARSO
B 200 060 246

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

(Survey di KPP Pratama Se Eks Karesidenan Surakarta)

ABSTRAKSI

Pajak sebagai salah satu ujung tombak sumber penerimaan Negara wajib diperhatikan pelaksanaannya agar memenuhi kriteria pemungutan pajak yaitu adil dan tidak memberatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang di timbulkan dari penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, 1) Penagihan pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,399 yang menunjukkan lebih besar dari t-tabel sebesar 2,059 atau $2,399 > 2,059$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,025 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka H1 diterima dan terdukung secara statistik sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. 2) Surat paksa pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,364 yang menunjukkan lebih besar dari t-tabel sebesar 2,059 atau $2,364 > 2,059$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,027 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka H2 diterima dan terdukung secara statistik sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II adalah diterima.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, Penerimaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan

ABSTRACTION

Taxes as one of the spearheads of sources of State revenue must be observed to fulfill the criteria of tax collection that is fair and not burdensome. Government efforts to increase state revenues through taxes must be balanced with better service to the community.

The purpose of this study is to determine the effect of the resulting tax collection and tax liabilities on the receipt of corporate income tax. The method of

analysis used in this study is multiple regression analysis is to find out how much influence arising from tax collection and tax letters of tax on income tax on corporate income.

From the results of this study can be seen that, 1) Tax collection obtained t-count value of 2.399 which shows greater than t-table of 2.059 or $2.399 > 2.059$, with p-value of 0.025 accepted at 5% significance level ($p > 0.05$) then H1 is accepted and supported statistically so that hypothesis 1 stating that tax collection affect the acceptance of corporate income tax. 2) Tax forcible letters obtained t-count value of 2.364 which shows greater than t-table of 2.059 or $2.364 > 2.059$, with a p-value of 0.027 accepted at the level of significance 5% ($p > 0.05$) then H2 received and supported statistically so that hypothesis 2 which states that the letter of force affect the acceptance of Corporate Tax on Primary Tax Office in the confines of the Regional Office of DJP Central Java II is accepted.

Keywords: *Tax Collection, Letter Force Tax, Tax Receipts, Corporate Income Tax*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tidak bisa hanya menggantungkan dana dari luar negeri saja, melainkan harus menggali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Di dalam GBHN juga menegaskan bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus dilandasi pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap saja. Hal tersebut merupakan dambaan seluruh rakyat Indonesia dan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu negara atau bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pembiayaan rutin pemerintah berdasarkan kemampuan sendiri. Oleh karena itu, peran serta aktif masyarakat harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran pemahaman bahwa pembangunan adalah hasil kewajiban dan tanggungjawab seluruh rakyat.

Agar pembangunan nasional tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki maka dibutuhkan pendanaan yang sangat besar, salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan perlu

ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber pembiayaan utama negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa penagihannya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590 (Suhendra; 2010).

Penegakan hukum kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu yang ditentukan antara lain adalah dengan memberlakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengeluarkan Undang-undang No.19 tahun 2000 sebagai ganti UU No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan sebagai ganti UU No. 19 tahun 1959 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Disamping itu penagihan pajak juga diatur dalam UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-undang ini disebutkan, apabila kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak sudah diinformasikan bahwa perhitungan pajaknya mengalami kekurangan bayar tetapi tidak juga melunasi maka tindakan yang dapat dilakukan oleh Kantor

Pelayanan Pajak(KPP) adalah melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pajak yang di dalamnya terdapat kekuatan hukum yang tetap meskipun dan dapat juga diajukan kasasi ketingkat yang lebih tinggi.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya. Dalam hubungan itu maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Sally:1999 dalam Wijoyanti 2008).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Furchan (2004:447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan

gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variable dengan cara memberi arti sehingga dapat memberi gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

1) Variabel Independen

a. Penagihan Pajak(X_1)

Penagihan Pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Koreksi fiskal atas SPT wajib pajak yang dilakukan oleh fiskus sehingga menyebabkan PPh terutang wajib pajak menjadi lebih besar yang harus ditagih dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak serta untuk meningkatkan penerimaan pajak.

b. Surat Paksa Pajak(X_2)

Surat paksa adalah surat perintah untuk segera membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh jurusita pajak Negara, apabila utang pajak tersebut tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran dikeluarkan.

PPh atas wajib pajak Badan yang masih tertunggak dan berhasil ditagih setelah diterbitkannya kebijakan surat paksa terhadap wajib yang mempunyai hutang PPh dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak.

2) Variabel Dependen

Penerimaan Pajak penghasilan (Y)

Penerimaan pajak penghasilan yang berhasil dihimpun dan atau diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jateng II dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah laporan/publikasi resmi dari KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Pelaksanaan penelitian meliputi dokumentasi data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini yaitu laporan/publikasi resmi dari KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II berupa laporan penagihan pajak, surat paksa pajak dan laporan penerimaan pajak yang diperoleh dari laporan seksi penagihan di KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II untuk tahun 2008-2012.

Sampel penelitian ini adalah laporan seksi penagihan di KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II yaitu KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Karanganyar, KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Klaten dan KPP Pratama Boyolali yang berupa laporan penagihan pajak, surat paksa pajak dan laporan penerimaan pajak untuk tahun 2008-2012.

1) Hipotesis 1

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel penagihan pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,399 yang menunjukkan lebih besar dari t-tabel sebesar 2,059 atau $2,399 > 2,059$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,025 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka H1 diterima dan terdukung secara statistik sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II adalah diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Syahab, Zakiah M dan Gisijanto, Hantoro Arief (2008) tentang Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan(PPh) Badan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan pelaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

2) Hipotesis 2

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel surat paksa pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,364 yang menunjukkan lebih besar dari t-tabel sebesar 2,059 atau $2,364 > 2,059$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,027 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka H2 diterima dan terdukung secara statistik sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II adalah diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Aprilianawati(2010) tentang Analisis Prosedur Pelaksanaan Penagihan PPh Badan Dengan Surat Paksa, Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui proses

pelaksanaan penagihan pajak PPh badan dengan surat paksa, kesesuaian pelaksanaan penagihan pajak PPh badan dengan surat paksa dibandingkan dengan prosedurnya dan mengetahui dampak penagihan pajak PPh Badan dengan surat paksa dan pengaruhnya dalam peningkatan penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggung jawabnya. Dalam hubungan itu maka pemerintah menjatuhkan sanksi bagi mereka yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Sally:1999 dalam Wijoyanti 2008).

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penagihan pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,399 yang menunjukkan lebih besar dari t-tabel sebesar 2,059 atau $2,399 > 2,059$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,025 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka H_1 diterima dan terdukung secara statistik sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II adalah diterima.
- 2) Surat paksa pajak diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,364 yang menunjukkan lebih besar dari t-tabel sebesar 2,059 atau $2,364 > 2,059$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,027 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka H_2 diterima dan terdukung secara statistik sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan PPh

Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II adalah diterima.

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II khususnya bagian penagihan agar surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat dengan harapan penerimaan pajak juga meningkat.
- 2) Bagi peneliti lain disarankan untuk mengambil sampel tidak hanya terbatas pada Kanwil DJP Jawa Tengah II tetapi diharapkan beberapa Kanwil DJP Jawa Tengah yang lain, sehingga daya generalisasi hasil penelitian dapat membandingkan pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan PPh Badan.
- 3) Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas penelitian dengan menambah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan.
- 4) Peneliti menyarankan agar penelitian yang akan datang mengambil jangka waktu yang lebih lama lagi dari penelitian ini untuk diteliti, serta tidak hanya wajib pajak badan saja melainkan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianawati. Ika. 2010. *Analisis Prosedur Pelaksanaan Penagihan PPh Badan Dengan Surat Paksa, Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Djarwanto. 1990. *Statistik Ekonomi*. Edisi 2. FE UGM Press : Yogyakarta
- Erwis, Nana Adriana. 2011. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor*

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi dipublikasikan, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Fika, Asri Agusti dan Vinola Herawaty. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang

Furchan. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : FE UII Press

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan : Sumarno Zain. Erlangga : Jakarta

Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

Indrawati, Sarastika dan Daryono Subagyo. 2006. *Analisis Uji Kausalitas Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Surakarta dengan Menggunakan Metode Granger Tahun 1987-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 7, No 2, Desember 2006, hlm 162-183

Kosasih, 2008. *Analisis Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pajak XXX*. Jurnal Manajemen, Vol. 6 No. 2

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga : Jakarta

Krisyantoro. 2006. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Eresco : Bandung

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi 11, Andi. Yogyakarta.

Munawir, S. 1992. *Perpajakan*. Liberty : Yogyakarta

Pandiangan, Liberty. 2003. *Tarif Penentu dalam Perhitungan Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol. 3. No. 2. September, hal 20-26

Purnawan, Amin. 2004. *Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Pajak Dan Aspek Keadilannya*. Jurnal Hukum, vol.14, No. 1, Hal 33-51. Jakarta.

Resmi, Siti. 2006. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta.

Rusdji, Muhammad. 2005. *PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Indek. Jakarta

- Samsul Bahri Samin. 2008. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sinulingga, Evan Emanuel. 2013. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000*. Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No.1, Maret 2013
- Soemitro, Rochmad. 2006. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. PT.Eresco. Jakarta
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis. No. 1, Volume 15, April 2010
- Sukmadinata. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta
- Syahab, Zakiah M dan Gisijanto, Hantoro Arief, 2008, *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis. No.2, vol.13
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Mampang*. Skripsi dipublikasikan. Program Sarjana Universitas Pembanguna Nasional "Veteran". Jakarta
- _____. Undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- _____. Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- _____. Keputusan Menteri Keuangan No. 13/KMK.01/2002
- _____. Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003
- _____. Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus